BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Profil Tempat Kerja Praktek

Profil tempat kerja praktek melingkupi latar belakang, sejarah , visi dan misi, logo, dan struktur organisasi instansi.

2.1.1. Latar Belakang PMI

Pada Waktu Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintahan militer Jepang (1942-1945) banyak pemuda Indonesia yang menjadi anggota berbagai kesatuan militer Jepang seperti HEIHO, GYU GUN, dan PETA (Pembela Tanah Air). Demikian pula dilingkungan masyarakat dibentuk berbagai organisasi untuk menghimpun dan melatih para pemuda guna menjaga keamanan dan ketertiban dan jika diperlukan sebagai cadangan untuk membela tanah air yang pada waktu itu merupakan bagian dari apa yang dinamakan “Asia Timur Raya”.

Pada masa pendudukan militer Jepang itulah sebenarnya pemuda Indonesia dapat mengenal dan merasakan kehidupan sebagai seorang militer, belajar menggunakan alat perang modern dan menanamkan rasa cinta tanah air serta siap untuk berkorban. Yang lebih penting lagi adalah ditanamkannya disiplin pribadi dalam menghadapi tugas bersama.

Setelah militer Jepang kalah perang tanpa syarat oleh militer sekutu maka Indonesia terdapat kekosongan kekuasaan pemerintahan karena militer Jepang selaku pihak yang kalah perang sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi sebagai penguasa pemerintahan. Di sisi lain pemerintah Belanda yang semula berkuasa di Indonesia belum dapat berbuat apa-apa karena masih berstatus tawanan militer Jepang yang untuk pembebasannya terikat oleh ketentuan-ketentuan Internasional. Demikian pula dengan pihak Sekutu selaku pemenang perang belum sempat menginjakan kakinya di bumi Indonesia.

Dalam keadaan kekosongan itulah, dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, atas nama rakyat Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Sudah diperkirakan oleh para pemimpin dan politisi pada waktu itu bahwa dengan proklamasi kemerdekaan itu akan terjadi berbagai peristiwa yang menuntut pengorbanan yang untuk itu kita harus memperkuat diri dengan senjata sejauh apa yang dapat diusahakan. Salah satu cara yang dapat ditempuh ialah dengan merampas senjata dari tangan militer Jepang dan para pemuda yang kebetulan menjadi anggota militer Jepang. Dengan usaha dan tekad seperti itu, tentunya dapat dipastikan pula bahwa akan terjadi bentrokan bersenjata antara pemuda Indonesia dan militer Jepang.

Memang kenyataan menunjukan bahwa di berbagai daerah termasuk Jawa Barat, khususnya kota Bandung dan sekitarnya, terjadi berbagai tindakan perampasan senjata oleh para pemuda dari tangan militer Jepang. Tak ayal lagi bahwa pada setiap peristiwa pergolakan bersenjata itu senantiasa terdapat korban baik yang gugur maupun yang luka. Pada waktu itu siapa saja yang mampu memberikan pertolongan dan perawatan kepada mereka yang gugur atau luka, beranggapan bahwa tindakan mereka yang sedemikian itu bukanlah hanya bersifat kemanusiaan tetapi terutama sebagai bukti keterlibatan membela tanah air setelah proklamasi. Peristiwa demi peristiwa terjadi di kota Bandung dan sekitarnya. Rumah sakit yang ada di kota Bandung sibuk memberikan pertolongan.

Jika pada waktu pemerintahan Hindia-Belanda dahulu organisasi Palang Merah Hindia Belanda tidak populer ditengah masyarakat maka pada waktu itu dibawah pemerintahan militer Jepang rakyat sudah dapat melihat dan mengenal Palang Merah yang ada di kesatuan-kesatuan militer bahkan sudah dapat memahami tentang status, tugas dan kewenangannya menolong prajurit yang luka dalam medan pertempuran.

Dengan pemahaman yang terbatas itu maka pemuda-pemudi Indonesia yang telah dapat memberikan pertolongan kepada yang luka dengan mendampingi teman-teman mereka dalam perampasan senjata militer Jepang, menganggap atau merasakan bahwa mereka mengemban tugas dan pengabdian itu sama halnya dengan pengabdian Palang Merah baik yang ada di kesatuan militer Jepang maupun negara lain. Oleh karena itu, dalam kesehariannya mereka menamakan kelompok atau regu mereka dengan nama regu "Palang Merah". Tidak terlintas pada pikiran mereka bahwa Palang Merah itu merupakan suatu organisasi yang bersifat Internasional dan pembentukannya terikat oleh prosedur yang telah ditentukan. Sedangkan bagi mereka yang sudah mengetahui bahwa Palang Merah itu bersifat netral dan tidak boleh dijadikan sasaran tembak maka mereka menggunakan Ban Lengan Palang Merah sebagai tanda pelindung. Pada waktu itu banyak sekali yang ingin begabung dalam Kelompok Palang Merah para wanita dan usia muda.

Memperhatikan suasana yang semakin memanas dan memperhitungkan bahwa hari-hari berikutnya akan terjadi banyak bentrokan bersenjata, tidak saja dengan militer Jepang tetapi juga dengan militer Sekutu serta militer Belanda yang merasa tidak senang dengan proklamasi kemerdekaan RI maka dirasakan sudah sangat mendesak perlu adanya organisasi Palang Merah yang resmi dan teratur agar dalam pelaksanaan pengabdiannya dapat lebih professional. Fokus perhatian adalah untuk mengantisipasi peristiwa yang mungkin terjadi[1].

2.1.2. Sejarah PMI Jawa Barat

PEMBENTUKAN PALANG MERAH BANDUNG

Sadar terhadap perkembangan situasi dan kebutuhan untuk memberikan pertolongan dan pelayanan bagi para pejuang yang gugur maupun yang luka, dr. Djoendjoenan, Kepala Jawatan Kesehatan Kotapraja Bandung, pada tanggal 9 September 1945, membentuk

organisasi “PALANG MERAH BANDUNG” yang bersifat lokal kerena pada saat itu Perhimpunan Palang Merah Indonesia yang bersifat nasional belum ada. Jadi, tidaklah heran jika pada namanya pun tidak tercantum kata “INDONESIA” seperti yang ada sekarang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak saja kelahiran Palang Merah Bandung lebih awal dari Perhimpunan Palang Merah Indonesia, juga cikal bakal Palang Merah Indonesia di Jawa Barat.

Waktu itu Institut Pasteur Bandung sangat sibuk memenuhi kebutuhan vaksin, serum dan sebagainya. Yang diperlukan oleh berbagai Rumah Sakit terutama untuk pelayanan para pejuangan yang luka. Oleh karena itu dr. Djoendjoenan selaku Kepala Jawatan Kesehatan Kotapraja Bandung berpendapat bahwa sangat tepat kalau dr. Sardjito yang baru beberapa hari mengemban tugas selaku Kepala Institu Pasteur Bandung yang diambil alih dari tangan Jepang pada tanggal 1 September 1945 oleh dr. Moh. Saleh, dr. Soebroto, dan Soekarnen (analis kepala), untuk mejadi ketua “PALANG MERAH BANDUNG”. Atas ketersediaan dr. Sardjito maka pada tanggal 9 September 1945 itu tercatatlah ia sebagai Ketua Palang Merah Bandung yang pertama.

Dengan dibantu dr. Moch. Kartobi Tirtawijaya, dr. Sardjito berusaha memperkuat organisasi dengan jumlah anggota yang masih terbatas dan sekaligus mengabdi di lapangan memberikan pertolongan terutama terhadap para pejuang di Bandung dan sekitarnya. Lebih jauh bahkan berhasil membentuk organisasi Palang Merah yang lebih luas sebagaimana terdapat pada uraian berikut.

Karena keadaan sangat gawat dan suasana panas maka pada bulan Desember 1945, bersama pegawai, dengan membawa peralatan yang bisa diselamatkan, dr.Sardjito pindah ke Klaten. Karena rasa cinta pada “Palang Merah” sudah demikian kuat pada pribadi dr. Sardjito, dengan pengalaman selama di Bandung berhasil pula membentuk organisasi

Palang Merah Indonesia diseluruh kecamatan yang ada di Klaten pada bulan Januari 1946[1].

PEMBENTUKAN PALANG MERAH NASIONAL INDONESIA DAERAH PRIANGAN

Terpengaruhi suasana panas yang semakin bergejolak dan prediksi keadaan pada hari-hari mendatang maka pihak Palang Merah Indonesia Bandung dan Jawatan Kesehatan Kotapraja Bandung mengambil langkah mengintensifkan peran dan kesiagaan rumah sakit yang ada dan sekaligus mengembangkan saya Palang Merah Indonesia di tengah masyarakat.

Dokter Tjokro Hadidjojo ditunjuk sebagai coordinator Rumah Sakit yang ada di Bandung meliputi Rumah Sakit Cicendo dengan pimpinan dr. Moch Saleh dibantu tenaga lainnya terdiri dari dr. Gondosuweno, dr. Soengkono, dr. Samedi, dr. Soebroto, dan dr. Soepiandi. Di Rumah sakit Situsaeur dengan pimpinan dr. Admiral dibantu dr. Soesatio Koesoemohandojo, dr Kartobi Tirtawijaya, dr. Harsono, dr. Ong Teng How, dr. Go Sie Hang dan dr. Poespoenegoro. Di Rumah Sakit Tjitjadas dengan pimpinan dr. Sudikna Ranadipura dibantu tenaga lainnya yaitu dr. A. Rifai. Di Institut Pateur Bandung dipimpin dr. Sardjito dibantu dr. Roechiyat. Di DKR. Kota Bandung dr. Soenarto. Disamping itu Balai Pengobatan Pasundan dan Balai pengobatan Waringin juga disiagakan.

Setelah tim koordinasi Rumah Sakit di Kota Bandung terbentuk dan organisasi Palang Merah mulai ditata, yang semuanya berlangsung dalam beberapa hari saja, atas perkiraan situasi yang akan dihadapi, maka kesiagaan Rumah Sakit tidak hanya dipusatkan di Kota Bandung tetapi juga diteruskan diwilayah priangan. Ini berarti organisasi Palang Merah, selaku mitra Rumah Sakit, perlu dikembangkan karena Rumah Sakit seolah-olah merupakan markas bagi Palang Merah Indonesia.

Dalam waktu yang singkat pula ditetapkanlah susunan personalia penanggungjawab kesiagaan untuk wilayah priangan yaitu dj DKR. Kabupaten Bandung terdiri dari dr. Poerwo, dr. Moch. Sastrawinangun, dr. Sanitioso dan dr. Semeroe. Di DKR. Sumedang terdiri dari dr. Sanusi Ghalib dan dr. Djoenaedi. Di DKR Garut terdiri dari dr. Maskawan dan dr. Bahroem, dr. Rachmat, dr. Barnas Alibasjah, dr. Soediono, dr. Sappuan dan dr. Soewondo. Di DKR Ciamis adalah dr. Moeljono dan dr. Soewarto. Selain dari tenaga dokter, banyak pula tenaga medis lainnya yang melibatkan diri seperti perawat, bidan dan asisten apoteker.

Sebagai langkah nyata pengembangan Palang Merah maka dibentuklah "PALANG MERAH NASIONAL INDONESIA DAERAH PRIANGAN" dengan ketuanya dr. Sardjito dan penulis Sukarman. Pengertian "Daerah" dalam pembentukan kepengurusan diatas tidaklah berarti suatu tingkat kepengurusan yang organisatoris merupakan tingkat lebih tinggi atas kepengurusan PMI yang ada didaerah tingkat kabupaten/kotapraja karena pada waktu itu didaerah priangan barulah satu kotapraja saja yang telah membentuk organisasi Palang Merah yakni kota Bandung. Dengan demikian apa yang dimaksud dengan "PALANG MERAH NASIONAL INDONESIA DAERAH PRIANGAN" dilihat dari jangkauan wilayah kerja saja.

Memperhatikan nama organisasi diatas maka dapat dipahami bahwa kepengurusan palang merah yang bersifat nasional belum berjalan. Dengan demikian dapatlah diisyaratkan bahwa lahirnya "PALANG MERAH NASIONAL INDONESIA DAERAH PRIANGAN" mungkin bersamaan atau lebih awal dari "Pembentukan Palang Merah Indonesia". Berkenaan dengan persetujuan wakil presiden RI. Terhadap usul mentri kesehatan RI. dr. Boentaran Martoatmodjo untuk membentuk organisasi Palang Merah Indonesia yang bersifat nasional oada tanggal 3 September 1945, pada waktu itu, informasinya sudah didengar oleh dr. H.A. Patah sebagai dokter

karesidenan priangan, dr. Poerwodihardjo sebagai dr. DRK kabupaten Bandung, dr. Djoendjoenan sebagai kepala DKR Kotapraja Bandung dan dr. Sardjito sebagai kepala Institut Pasteur Bandung.

2.1.3. Logo PMI

Logo Palang Merah Indonesia terdiri dari "Logo Gram" berupa palang merah simetris yang dikelilingi lima lengkungan setengah lingkaran yang saling menyatu, dan "Logo Tipe" berupa tulisan "Palang Merah Indonesia".



PALANG MERAH INDONESIA

Gambar 2.1 Logo PMI horizontal



Gambar 2.2. Logo PMI vertikal

Dalam penggunaannya logo PMI, logo tipe bisa ditulis secara horizontal (gambar 2.1.) ataupun vertical (gambar 2.2.) selama tidak merubah jenis huruf pada logo tipe yakni Helvetica.

2.1.4 Visi dan Misi PMI Provinsi Jawa Barat

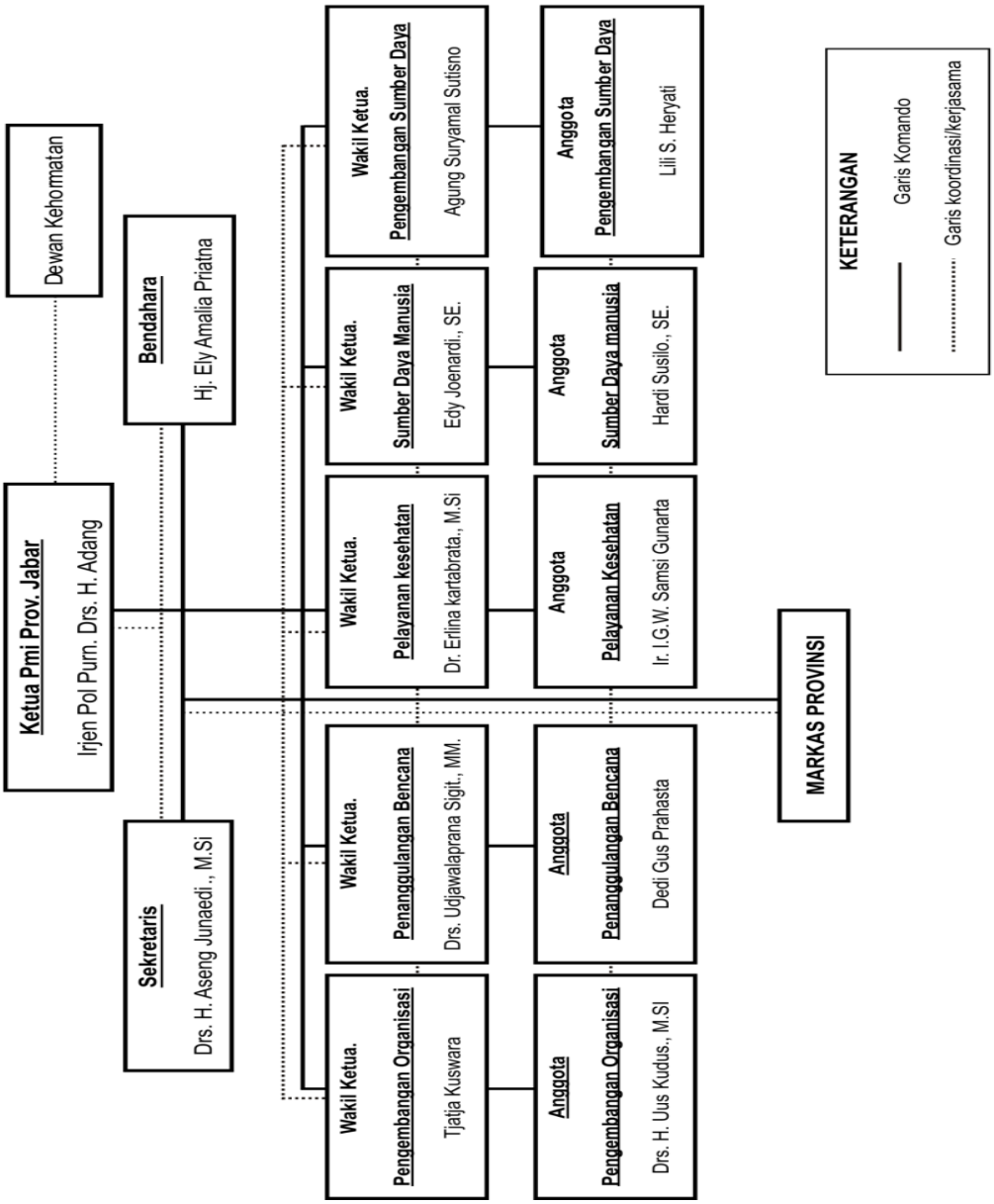
Adapun Visi dari PMI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut **"**Revitalisasi PMI Provinsi Jawa Barat dalam rangka mengoptimalkan produktivitas kinerja organisasi menuju bentuk pelayanan prima".

Adapun Misi dari PMI Provinsi Jawa Barat adalah sebagi berikut.

1. Meningkatkan kompetensi kelembagaan melalui penguatan organisasi.
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
3. Meningkatkan kompetensi ketatalaksanaan (PMI Provinsi Jawa Barat sebagai middle management) – sebagai katalisator antara pemerintah dan masyarakat.
4. Peningkatan integritas, peneguhan dedikasi dan loyalitas seluruh pengurus PMI Provinsi Jawa Barat termasuk PMI Kabupaten/kota dan kecamatan.

2.1.5. Struktur Organisasi dan Deskripsi Pekerjaan

Menjelaskan mengenai struktur organisasi pengurus PMI Provinsi Jawa Barat beserta deskripsi pekerjaannya



Gambar 2.3. Struktur Organisasi Pengurus PMI Provinsi Jawa Barat

Kepengurusan PMI Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh satu orang ketua yang membawahi lima orang wakil ketua (Gambar 2.2.). Setiap wakil ketua bertanggung jawab pada sebuah bidang yang akan dibantu oleh anggota PMI Provinsi Jawa Barat

2.1.5.1. Ketua

a. Memimpin PMI Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pokok-pokok kebijakan dan rencana strategis Palang Merah Indonesia tahun 2009-2014, peraturan organisasi, keputusan kebijakan pengurus PMI Provinsi Jawa Barat.
b. Memelihara hubungan yang erat dengan Pemerintah Provinsi. Lembaga dan Badan pemerintahan dan lembaga non Pemerintahan yang terkait dengan gerakan kemanusiaan.
c. Membina dan memantau pelaksanaan musyawarah Provinsi, musyawarah kerja Provinsi, musyawarah kabupaten/kota, musyawarah kerja Kabupaten/kota dan pertemuan lainnya yang diselenggarakan PMI Provinsi Jawa Barat.
d. Memimpin rapat-rapat pengurus PMI Provinsi Jawa Barat dan rapat-rapat lain sesuai dengan ketntuan organisasi.

2.1.5.2. Bidang Pengembangan Organisasi

a. Membantu ketua dalam mengkoordinasi dan mengarahkan pelaksanaan tugas anggota bidang pengembangan organisasi .
b. Mengembangkan struktur, sistem ,keaktifan dan kapasitas organisasi PMI Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.
c. Melaksanakan tugas dibidang organisasi secara berhasil guna termasuk pembinaan dan pengawasannya.
d. Mengatur kegiatan anggota pengurus dibidang organisasi.

2.1.5.3. Bidang Penanggulangan Bencana

a. Membantu ketua dalam mengkoordinasi dan mengarahkan pelaksanaan tugas anggota dibidang pelayanan penangulangan bencana.

b. Memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang rentan sebelum, pada saat dan sesudah bencana.
c. Melaksanakan tugas dibidang pelayanan penangulangan bencana secara berhasil guna termasuk pembinaan dan pengawasan.

2.1.5.4. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Membantu ketua dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas anggota dalam bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (pengurus-staf dan Relawan).
b. Melaksanakan tugas dibidang pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia secara berhasil guna termasuk pembinaan dan pengawasanya.
c. Mendukung dan melaksanakan berbagai program bantuan/proyek yang berkaitan dengan bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.

2.1.5.5. Bidang Pengembangan Sumber Daya

a. Membantu ketua dalam mengkoordinasi dan mengarahkan pelaksanaan tugas anggota dibidang pengembangan Sumber Daya (penggalangan dana, kemitraan strategis dan unit usaha).
b. Melaksanakan tugas dibidang pengembangan sumber daya secara berhasil guna termasuk pembinaan dan pengawasan.
c. Mendukung dan melaksanakn berbagai program bantuan/proyek yangbberkaitan dengan pengembangan sumber daya.

2.1.5.6 Bidang pelayanan kesehatan dan Unit Donor Darah

a. Membantu ketua dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas anggota dibidang pelayanan kesehatan dan unit donor darah.

b. Membantu menyelenggrakan Unit Donor Darah (UDD) bagi masyarakat dengan dukungan Unit Donor Darah Kabupaten/Kota se Jawa Barat.
c. Mengatur kegiatan anggota pengurus yang ditugaskan dan dibantukan secara koordinatif dibidang pelayanan sosial, pelayanan kesehatan dan Unit Donor Darah.
d. Mengembangkan keberadaan dan fungsi Unit Donor Darah dan klinik dilingkunagan PMI Provinsi Jawa Barat.

2.2. Landasan Teori

Landasan teori yang mendukung proses analisis sistem serta mendukung proses perancangan website PMI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut

2.2.1. Pengertian Sistem

Sistem menurut buku analisis desain dan informasi dapat dilihat dari dua kelompok pendekatan yaitu yang menekankan pada prosedur dan yang menekankan pada komponen atau elemenya.

1. Berdasarkan Penekanan Prosedur

   Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama untuk melakukan sesuatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. (Jogiyanto, H.M 1999:1)

2. Berdasarkan penekanan komponen

   Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Jogiyanto, H.M 1999:2)

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang tertentu, yaitu mempunyai komponen-komponen (*Component*), batas sistem (*Boundary*), lingkunagan luar sistem *(environmenst),* penghubung

(intrface) , masukan *(input),* pengolahan *(prosess)* keluaran *(output)* dan sasaran *(objektif)* atau tujuan (*goals*) (Jogiyanto, H.M 1999:3).

2.2.2. Pengertian Informasi

Informasi adalah data yang diolah menjadi suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) yang digunakan untuk mengambil keputusan (Jogiyanto, H.M 1999:8)

Sumber dan Informasi adalah data, data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kulaitas dari sistem informasi biasanya ditentukan oleh tiga hal, yaitu :

1. Ketepatan dalam informasi, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas mencerminkan maksudnya dan tidak menyesatkan.
2. Tepat pada waktunya *(on time)*, berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat.
3. Relevan *(relevance)* berarti informasi tersebut mempunyai manfaat.

2.2.3. Pengertian Sistem Informasi

Sistem Informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar dengan laporan-laporan yang diperlukan (Robert A. Leitch/K. Roscoe Davis. Accounting Information Systems).

2.2.4. Pengertian Website

Website adalah sebutan bagi sekelompok halaman web *(web page)*, yang berisikan teks, gambar, audio ataupun video. Sebuah websiter bisa bersifat online yang bisa diakses siapa saja yang terhubung ke internet, tapi

juga bisa bersifat offline yang hanya bisa diakses oleh beberapa user saja dalam sebuah jaringan lokal (Intranet).

2.2.5. Metode Analisi Perancangan Terstruktur

Untuk dapat melakukan langkah-langkah sesuai dengan yang diberikan oleh metodologi pengembangan sistem yang terstruktur, maka dibutuhkan alat untuk melaksanankannya. Alat-alat yang digunakan dalam suatu metodologi umumnya berupa suatu gambar, diagram, atau grafik. Selain berbentuk gambar, alat-alat yang digunakan juga ada yang tidak berupa gambar atau grafik, seperti kamus data dan *pseudocode,*

2.2.5.1. Flow Map

Flow map merupakan diagram alir yang menunjukan arus bagi dokumen, aliran data fisik entitas-entitas sistem informasi dan kegiatan operasi yang berhubungan dengan sistem informasi.

2.2.5.2. Diagram Kontek

Diagram kontek merupakan arus data yang berfungsi untuk menggambarkan keterkaitan aliran-aliran data antara sistem dengan bagian-bagian luar. Bagian luar merupakan sumber arus data atau tujuan data yang berhubungan dengan sistem informasi tersebut.

2.2.5.3. Data Flow Diagram

Data flow diagram adalah representasi grafis dari suatu sistem yang menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran data diantara komponen-komponen tersebut beserta asal tujuan dan penyimpanan datanya. *Data flow diagram* yang harus digambarkan dalam analisis maupun perancangan sistem adalah sebagai berikut :

1. *Context diagram* adalah *data flow diagram* tingkat paling atas dari sebuah sistem informasi yang menggambarkan keseluruhan proses dalam sistem.

2. *Data flow diagram physic level* (Diagram alir data level fisik) adalah *data flow diagram* yang menggambarkan entitas internal dan eksternal dalam suatu sistem beserta aliran dan tempat penyimpanan datanya.
3. *Data flow diagram logic level* (Diagram alir data lebih logis) adalah *data flow diagram* yang menggambarkan fungsi atau proses yang dilakukan sertupa entitas. Diagram alira data level logis lebih menunjukan dimana dan oleh siapa proses tersebut dilakukan.